



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# **TRANSFORMASI DIGITAL**

## **PELAYANAN PUBLIK & ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**AKSELERASI TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL INDONESIA  
MELALUI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA & IMPLEMENTASI**

Jakarta, 16 Juli 2024

# Visi Indonesia Emas 2045



Presiden Jokowi  
meresmikan  
peluncuran RPJPN  
2025-2045  
Kamis 15 Juni 2023

Alignment pada inisiatif  
strategis percepatan  
transformasi digital  
(GovTech)



Future Governance  
(Governance 5.0)

Perubahan paradigma yang  
semula "pemerintah  
mengatur masyarakat"  
menjadi "pemerintah  
bekerja bersama  
masyarakat"/masyarakat  
sebagai mitra

## Misi 1. Transformasi Sosial

- a. Kesehatan untuk Semua
- b. Pendidikan Berkualitas yang merata
- c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Transformasi  
Indonesia

## Misi 2. Transformasi Ekonomi

- a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- b. Penerapan Ekonomi Hijau
- c. Transformasi Digital
- d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- e. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

## Misi 3. Transformasi Tata Kelola

Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

## Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi

- a. Hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gentar kawasan keamanan nasional
- a. Stabilitas ekonomi makro
- b. Ketangguhan diplomasi

Landasan  
Transformasi

## Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a. Beragama dan berkebudayaan maju
- b. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
- c. Lingkungan hidup berkualitas
- d. Berketahanan energi, air, kemandirian pangan
- e. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Kerangka  
Implementasi  
Transformasi

Arah Kebijakan



Transformasi Digital ditopang 4 pilar berupa:

(1) Pemerintahan Digital, (2) Ekonomi Digital, (3) Masyarakat Digital, (4) Infrastruktur Digital sebagai pondasi

## Contoh Sukses Transformasi Digital di Berbagai Negara

### Contoh sukses di Pilar Pemerintahan Digital

India



Mempersingkat 40 tahun pembangunan, dicapai dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun<sup>1</sup>

Penerapan Aadhaar (ID), UPI (Payment) & DEPA (Data Exchange)

### Contoh sukses di Pilar Ekonomi Digital

Estonia



Pertumbuhan PDB per kapita 10x lipat dalam 20 tahun<sup>2</sup>

Penerapan X-Road (platform interoperabilitas data)

### Contoh sukses di Pilar Masyarakat Digital

Tiongkok



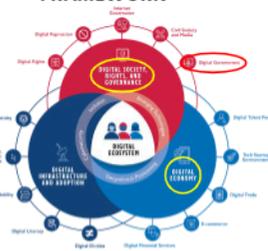
Penurunan kemiskinan eksponensial dari 5,7% ke 0,6% selama 5 tahun (2015-2019)<sup>3</sup>

Penerapan berbagai platform dalam program inklusi keuangan digital

## Referensi Kerangka Transformasi Digital

International Best Practices Kerangka Transformasi Digital (USAID & PBB), serta konsep Visi Indonesia Digital 2045, memiliki 4 Pilar utama yakni **Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, Masyarakat Digital, dan Infrastruktur Digital**

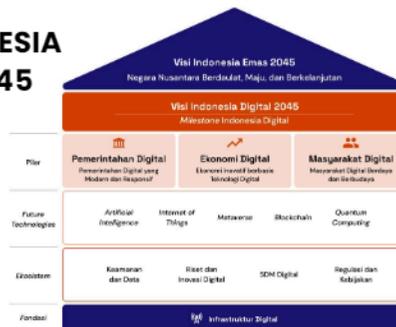
### USAID DIGITAL ECOSYSTEM FRAMEWORK



### UN DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK



## VISI INDONESIA DIGITAL 2045



## Ilustrasi Indikator Kesuksesan Penerapan 4 Pilar Transformasi Digital

### Pemerintahan Digital

Peningkatan Indeks Internasional:

1. E-Government Development Index (EGDI)
2. Govtech Maturity Index (GTMI)
3. Global Cybersecurity Index (GCI)

### Ekonomi Digital

1. Kontribusi Ekonomi Digital pada PDB
2. Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Digital

### Masyarakat Digital

1. Peringkat Indeks Masyarakat Digital (APAC)
2. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK terhadap total tenaga kerja
3. Peningkatan Indeks Literasi Digital Masyarakat

### Infrastruktur Digital

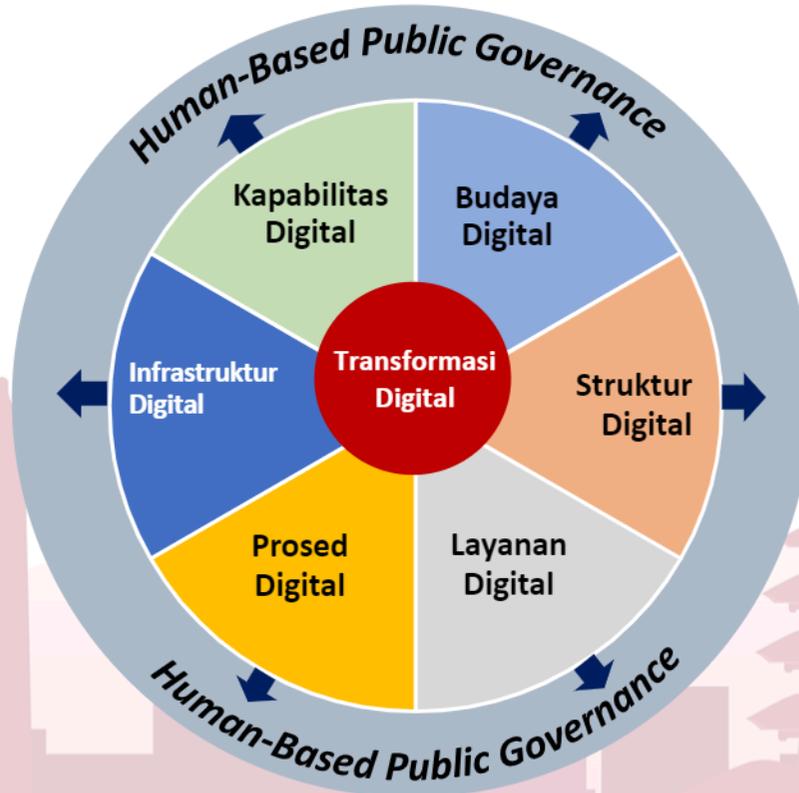
1. Perluasan jangkauan Seluler (*Mobile Broadband Coverage*)
2. Rata-rata kecepatan jaringan seluler
3. Peningkatan aksesibilitas pada daerah 3T

Sumber: <sup>1</sup> Outlook India  
<sup>2</sup> Bank Dunia  
<sup>3</sup> China Foundation for Poverty Alleviation (CFPA)

# FRAMEWORK GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (GDRBN) 2025-2045

## Transformasi Digital

Menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia (**World Class Bureaucracy**) dalam mendukung visi **INDONESIA MAJU** menuju **INDONESIA EMAS 2045**



## Human-Based Public Governance

Birokrasi yang berfokus pada penyediaan pelayanan publik berbasis siklus hidup manusia (dari lahir sampai kematian) melalui **penggunaan teknologi digital dan pelayanan terpadu.**

# KERANGKA TRANSFORMASI REFORMASI BIROKRASI

## Indonesia Maju untuk Indonesia Emas 2045



### REFORMASI BIROKRASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK PRIMA

#### Transformasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**DULU**  
Parsial berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  
Kinerja instansi belum sepenuhnya selaras mendukung pencapaian target pembangunan nasional



**KE DEPAN**  
Terpadu berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).  
Tercipta **keterpaduan kinerja antar-K/L dan Pemda** untuk mencapai outcome bersama dalam kerangka pembangunan nasional

#### Transformasi Digital & Keterpaduan Layanan Digital

**Menuju Indonesia Digital dengan Govtech:**

- Quick Wins SPBE: Keterpaduan 9 Layanan Prioritas
- Berorientasi *Citizen Centric* bukan *Government Centric*
- Untuk pertama kalinya, RI menuju negara dengan **keterpaduan layanan digital**

#### Digital Public Infrastructure:

- Digital ID
- Digital Payment
- Data Exchange

Smart ASN

Portal Layanan Publik

Tata Kelola Birokrasi di IKN

**Kompetensi, Budaya, Struktur, Proses, Infrastruktur Digital**

**Antisipatif**

**Prediktif**

**Solutif**

UU 20/2023 Aparatur Sipil Negara | UU 1/2024 Informasi & Transaksi Elektronik | UU 27/2022 Perlindungan Data Pribadi  
Perpres SPBE | Perpres Arsitektur SPBE Nasional | Perpres Satu Data Indonesia  
Perpres Percepatan Transformasi Digital & Keterpaduan Layanan Digital Nasional

**Tonggak Transformasi Digital yang Ditandatangani Presiden Joko Widodo**

# TEKNOLOGI UNTUK MEMUDAHKAN BIROKRASI PELAYANAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

SPBE Summit – Istana Negara – 27 Mei 2024



Joko Widodo  
@jokowi



Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima, hingga kemudahan urusan masyarakat.

GovTech INA Digital, teknologi untuk memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sebelumnya terdapat 27 ribu aplikasi level pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi. Maka, GovTech INA Digital diharapkan membuat semua terintegrasi, meminimalisasi birokrasi yang rumit, serta mengakselerasi sistem digital di sejumlah layanan prioritas.

GovTech INA Digital harus digunakan untuk memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik, juga meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data demi pemanfaatan GovTech INA Digital.



# TANTANGAN: KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL YANG EFEKTIF



## KONDISI SAAT INI



Masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi yang rumit & terduplikasi



Proses layanan yang masih kompleks, panjang & tidak transparan



Kebutuhan "*fotocopy* KTP" untuk mengakses layanan



Pengisian data yang berulang kali untuk mengakses layanan



## KONDISI SEHARUSNYA



1 Portal untuk berbagai layanan, dengan akses *single-sign on (SSO)*



Proses yang **simpel, cepat, mudah, & transparan**



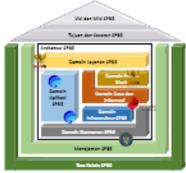
Tidak perlu *fotocopy* KTP. Akses dengan identitas digital untuk keamanan data pribadi



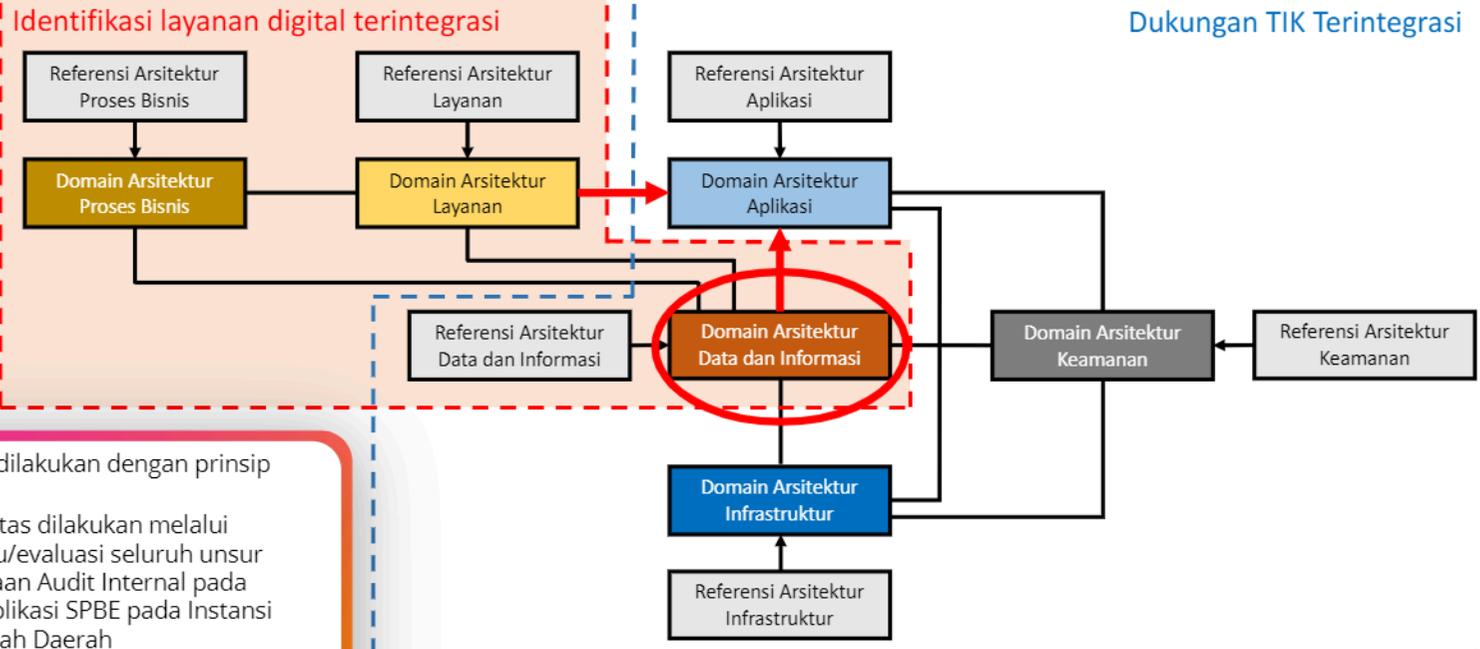
Satu kali isi data untuk berbagai layanan



# KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE RELASI DENGAN PELAKSANAAN AUDIT SPBE



**Arsitektur SPBE Nasional**



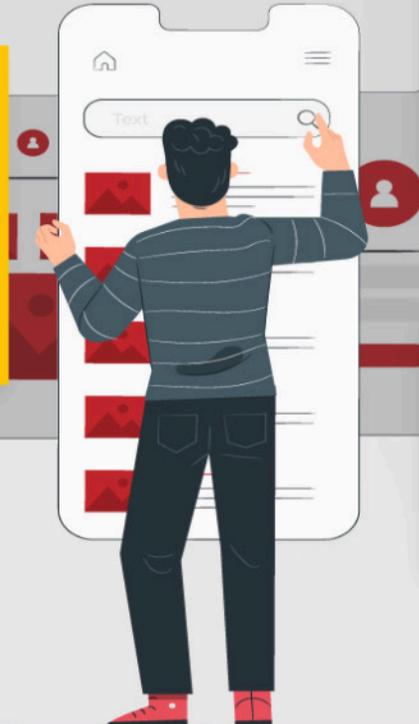
1. Penerapan SPBE dilakukan dengan prinsip akuntabilitas
2. Prinsip akuntabilitas dilakukan melalui pelaksanaan reviu/evaluasi seluruh unsur SPBE & pelaksanaan Audit Internal pada infrastruktur & aplikasi SPBE pada Instansi Pusat & Pemerintah Daerah
3. Audit SPBE memiliki relasi kuat dengan pelaksanaan PP 60/2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**, Pasal 18 ayat 3 huruf c: "**Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi**"

## AUDIT SPBE

# SPBE TIDAK HARUS MENAMBAH APLIKASI

Perlu dihindari:

**Satu Inovasi,  
Satu Aplikasi**



**PELAYANAN EKSTERNAL:**  
Warga tidak harus download begitu banyak aplikasi, bikin begitu banyak akun, isi berulang begitu banyak data.

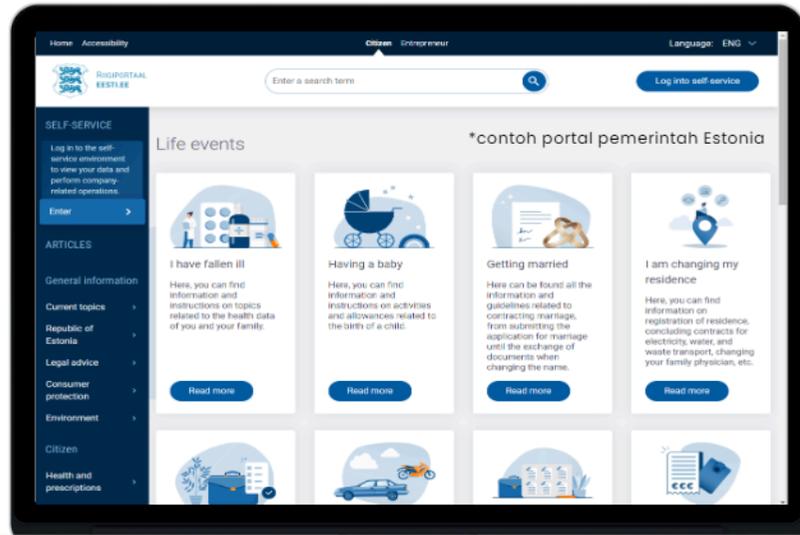


**PELAYANAN INTERNAL:**  
Integrasi/interoperabilitas antar-sistem di lingkup pemerintahan.

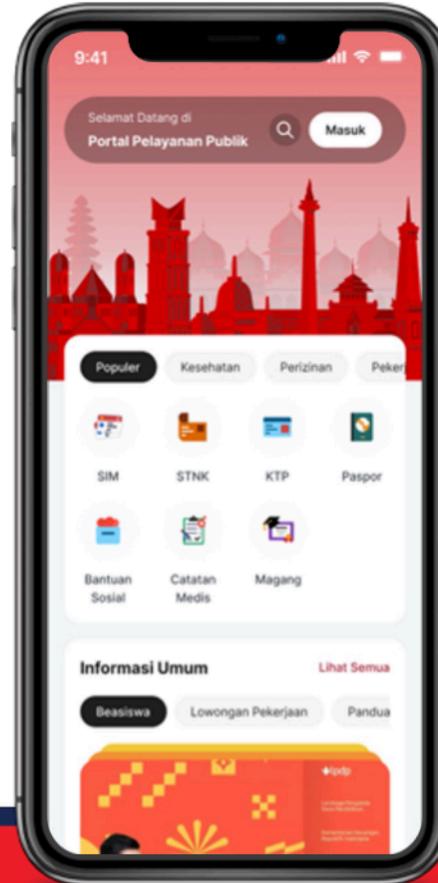
# Visi Layanan Digital Indonesia

## PRAKTIK BAIK INTERNASIONAL: ESTONIA

*Menu langsung cara mendapatkan layanan pekerjaan, kesehatan, kependudukan, bansos, kesehatan, persalinan, dan lainnya.  
(layanan bukan lagi government centric, melainkan citizen centric)*



## INISIASI AWAL DESAIN PORTAL NASIONAL INDONESIA



**NEGARA HADIR  
KAPAN PUN,  
DI MANA PUN.**

**CEPAT  
MUDAH  
MURAH**

Transformasi masif  
layanan negara  
dengan teknologi.

### Melahirkan Anak

1. Layanan Kesehatan (Asuransi untuk Ibu Hamil, Imunisasi dan Vaksin Anak, Konsultasi Ibu Hamil, Menyusui, dan Melahirkan)
2. Pelayanan Sosial dan Keuangan (Bansos PKH, Pembuatan KIA)
3. Administrasi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga)



### Melaksanakan Pernikahan

1. Prosedur syarat nikah muslim
2. Penerbitan akta perkawinan non muslim
3. Penerbitan KK setelah menikah
4. Perubahan data KTP setelah menikah
5. Penggabungan NPWP suami istri



### Mendaftar Sekolah

1. Prosedur syarat pendaftaran SD, SMP, dan SMA/SMK
2. Kurikulum dan syarat kelulusan SD, SMP, dan SMA/SMK
3. Daftar sekolah berdasarkan daerah beserta akreditasi pendidikan
4. Program pembiayaan pendidikan



### Mengendarai atau Memiliki Kendaraan

1. Prosedur dan syarat mendapatkan SIM
2. Prosedur perpanjangan SIM
3. Prosedur dan syarat mendapatkan SIM Internasional
4. Informasi rambu lalu lintas
5. Prosedur tilang dan pelanggaran lalu lintas
6. Prosedur perpanjangan STNK
7. Prosedur balik nama BPKB



### Memasuki Perguruan Tinggi

1. Daftar perguruan tinggi dan jurusan beserta akreditasi
2. Prosedur dan syarat mendaftar perguruan tinggi
3. Program Kampus Merdeka
4. Program Merdeka Belajar
5. Program Beasiswa Bidik Misi
6. Program Beasiswa LPDP
7. Penyetaraan ijazah luar negeri



### Memulai Berusaha

OSS RBA  
Layanan kepada dunia usaha meliputi pembuatan badan hukum, perizinan berusaha, dan perizinan lainnya.



Start

# LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH INDONESIA

## LIFE JOURNEY BERBASIS CITIZEN CENTRIC

Informasi dan Layanan Umum



1. Berita, Radio, Ijin Produk, Cuaca, Iklim, Kualitas Udara, Gempa Bumi, Tsunami, Bencana, Risiko Bahaya.
2. Layanan Kelistrikan (PLN Mobile) dan Bahan Bakar (MyPertamina)

End

### Tutup Usia

1. Administrasi Kematian dan Pemakaman (Izin Pemakaman, Akte Kelahiran)
2. Asuransi dan Keuangan Terkait Kematian (Non-Aktif BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
3. Administrasi Non Aktif Pajak dan Keuangan (NPWP)
4. Administrasi Hukum dan Warisan



### Mengalami sakit

1. Prosedur berobat dengan BPJS Kesehatan
2. Pencarian fasilitas kesehatan berdasarkan daerah
3. Pencarian dokter spesialis berdasarkan daerah
4. Layanan Telemedicine



### Mengajukan Perceraian

1. Prosedur dan syarat pendaftaran perceraian
2. Penerbitan akta perceraian
3. Pemecahan KK setelah bercerai
4. Perubahan data KTP setelah bercerai
5. Mendaftar NPWP setelah bercerai



### Membeli dan Memiliki Tempat Tinggal

1. Jenis sertifikat kepemilikan tempat tinggal
2. Prosedur dan tata cara membeli tempat tinggal
3. Prosedur mendapatkan IMB
4. Tata cara pembayaran PBB
5. Informasi pinjaman KPR



### Transportasi dan Berpergian

1. Layanan Transportasi dan Informasi Perjalanan (Tiket Kereta Api, Kereta Cepat, Bus, Pesawat, Kapal Laut, Cek Kelaikan Bus, Info Pariwisata, Asuransi)
2. Paspor dan Visa (Prosedur, Perpanjangan, Pendaftaran)
3. Kedutaan dan Konsulat (Alamat, Kontak KBRI dan Kedubes Negara Lain)



### Mencari Pekerjaan

1. Cari Kerja dan Persiapan Kerja (Mencari Pekerjaan, Prakerja)
2. Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)
3. Administrasi Keuangan (NPWP, PPH)
4. Kebijakan Kesejahteraan Pegawai dan PHK



## 5 Layanan Mendukung Percepatan Pembangunan Portal Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur



**Layanan oleh RSUD Dr. Soetomo**  
Pendaftaran Online SIM Rumah Sakit, Booking Ambulans, Sistem Informasi Pasien dan Ketersediaan Kamar



**Layanan oleh DPMPSTP**  
Layanan perizinan terpadu



**Layanan oleh BKD (Rumah ASN dan Simaster)**  
Kenaikan pangkat, layanan webinar, database kepegawaian di Jatim



**Klinik Hoaks**  
Pengecekan berita hoaks



**Layanan oleh Diskominfo (Open Data Jatim)**  
Terdapat 47 dataset Sebagai media monitoring

# CONTOH KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL PEMDA PROVINSI JAWA TIMUR

## KOTA SURABAYA

Satu Aplikasi untuk Semua Layanan Pemerintah

### Pengaduan

- Service Desk
- Whistleblowing System
- PPIID
- Media Center
- SIPAN Laporan

### Perizinan

- SSW Alfa (Back Office)
- Klampid New Generation
- E-Ruttlahu (manev pengajuan ruttlahu)
- RMB (verifikasi berkas)
- SKRK (verifikasi berkas)
- eRusun (manev pengajuan rumah susun)

### GRMS (Government Resources Management System)

- E-Performance
- E-Delivery
- E-Planning
- E-Budgeting
- E-Accounting
- E-Revenue
- E-Project
- E-Controlling
- E-Payment

### Manajemen Kinerja

- E-SDM
- E-Surat
- PPNIS (Penyidik PNS)
- SAKIP
- Peken

### Kesehatan

- SIM RSUD Bhakti Dharma Husada
- SIM RSUD Dokter Mohamad Soewandie
- Aplikasi Dinas Kesehatan

### Pendidikan

- Profil Sekolah (database)
- E-Office (administrasi layanan pendidikan)

### Kemiskinan

- Sayang Warga (survey)
- Padat Karya (monitoring intervensi pekerjaan)
- Si Keluarga Miskin (verifikasi keluarga miskin)
- ASSIK (aplikasi info loket)

## KABUPATEN BANYUWANGI

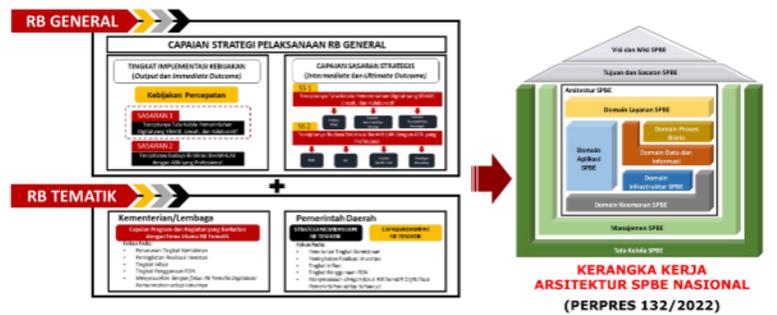
## LAYANAN SMART KAMPUNG



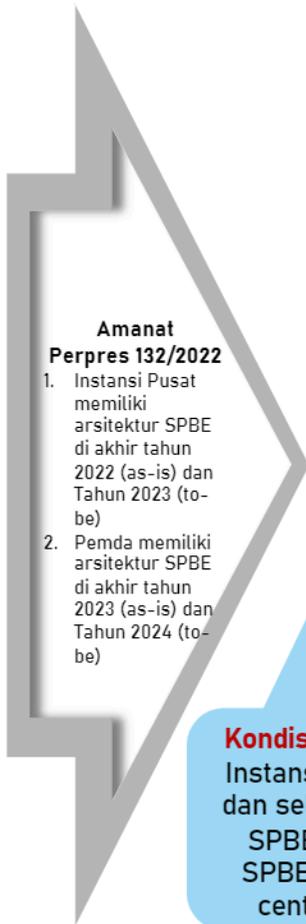
# PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PENILAIAN RB INSTANSI



**Pemanfaatan SIA-SPBE membantu IPPD** memahami bagaimana implementasi arsitektur SPBE untuk mencapai sasaran RB General ke-1, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”**



SIA SPBE → <https://arsitektur.spbe.go.id>



**Amanat Perpres 132/2022**

1. Instansi Pusat memiliki arsitektur SPBE di akhir tahun 2022 (as-is) dan Tahun 2023 (to-be)
2. Pemda memiliki arsitektur SPBE di akhir tahun 2023 (as-is) dan Tahun 2024 (to-be)

*Komponen penilaian RB pada indikator arsitektur SPBE pada SIA-SPBE:*

*0 = belum ada*

*1 = tersedia arsitektur as-is*

*2 = tersedia arsitektur to-be*

*3 = tersedia peta rencana SPBE*

*4 = telah melaksanakan clearance belanja SPBE*

*5 = review dan evaluasi*

**Kondisi to-be arsitektur SPBE**  
Instansi yang telah ditetapkan dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional pada SIA - SPBE, mengutamakan user centric dan *life - journey*

**Kondisi as-is arsitektur SPBE**  
Instansi yang telah ditetapkan dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional pada SIA - SPBE



# TALENTA ASN DIGITAL MENUJU BIROKRASI DIGITAL

Rekrutmen ASN mengutamakan kualifikasi SDM yang telah memiliki talenta digital, baik untuk pengelola SPBE melalui penyelarasan dengan kamus kompetensi digital dan bagi ASN secara umum (Non-Pengelola SPBE) melalui kompetensi dasar literasi digital, untuk wujudkan Birokrasi Digital

## PENGGUNA SPBE:

Untuk pegawai ASN secara umum (Non-Pengelola SPBE), berupa **kompetensi dasar literasi digital (sebagai kompetensi umum)**, untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas

## PENGELOLA SPBE:

**Pegawai ASN** dan pihak-pihak lain (misal: pejabat, PPNPN) dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang **mengelola penerapan SPBE (Pengelola SPBE)**.

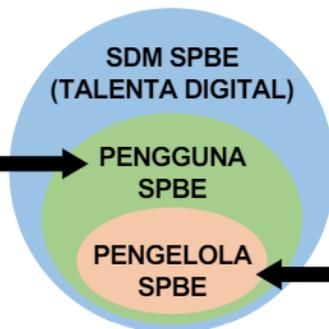
## KOMPETENSI SPBE

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang terkait dengan **pengelolaan penerapan SPBE** dan/atau **pemanfaatan layanan SPBE**.



Program Literasi Digital oleh  
Kementerian Kominfo

Program Literasi Digital yang disediakan oleh  
setiap instansi, dikoordinasikan oleh LAN



Peraturan perundang-undangan terkait  
Manajemen ASN (UU ASN 20/2023)

Kamus Kompetensi Teknis Pengelola SPBE  
(Mengutamakan keahlian dan sertifikasi SDM TIK)





# MENUJU MASA DEPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

## Future Governance (Governance 5.0)

Perubahan paradigma yang semula  
“Pemerintah mengatur masyarakat” menjadi  
“Pemerintah bekerja bersama masyarakat”/  
Masyarakat sebagai mitra  
*(a mindset shift: “from governing for citizens to governing with citizens”)*

**Penggerak/  
Enabler:**

**Basis  
Data**

Data-Driven



*Cryptography as a Services*

**Transformasi  
Digital**

Digital by Design



*Security by Design*

**SDM  
Berdaya  
Saing**

Digital Culture



*Security Awareness*

# EKOSISTEM KOLABORATIF UNTUK INOVASI BIROKRASI



## AKADEMISI

Memperkuat kebijakan reformasi birokrasi dan inovasi dengan data & analisa akademik (*evidence-based policy*)



## MEDIA

Mendukung internalisasi kebijakan reformasi birokrasi kepada *stakeholder* serta menyampaikan berbagai praktik baik/inovasi melalui komunikasi dua arah



## SEKTOR SWASTA

Turut terlibat dalam perumusan kebijakan dan berkolaborasi dalam implementasi pelayanan publik melalui inovasi-inovasi dari sektor swasta



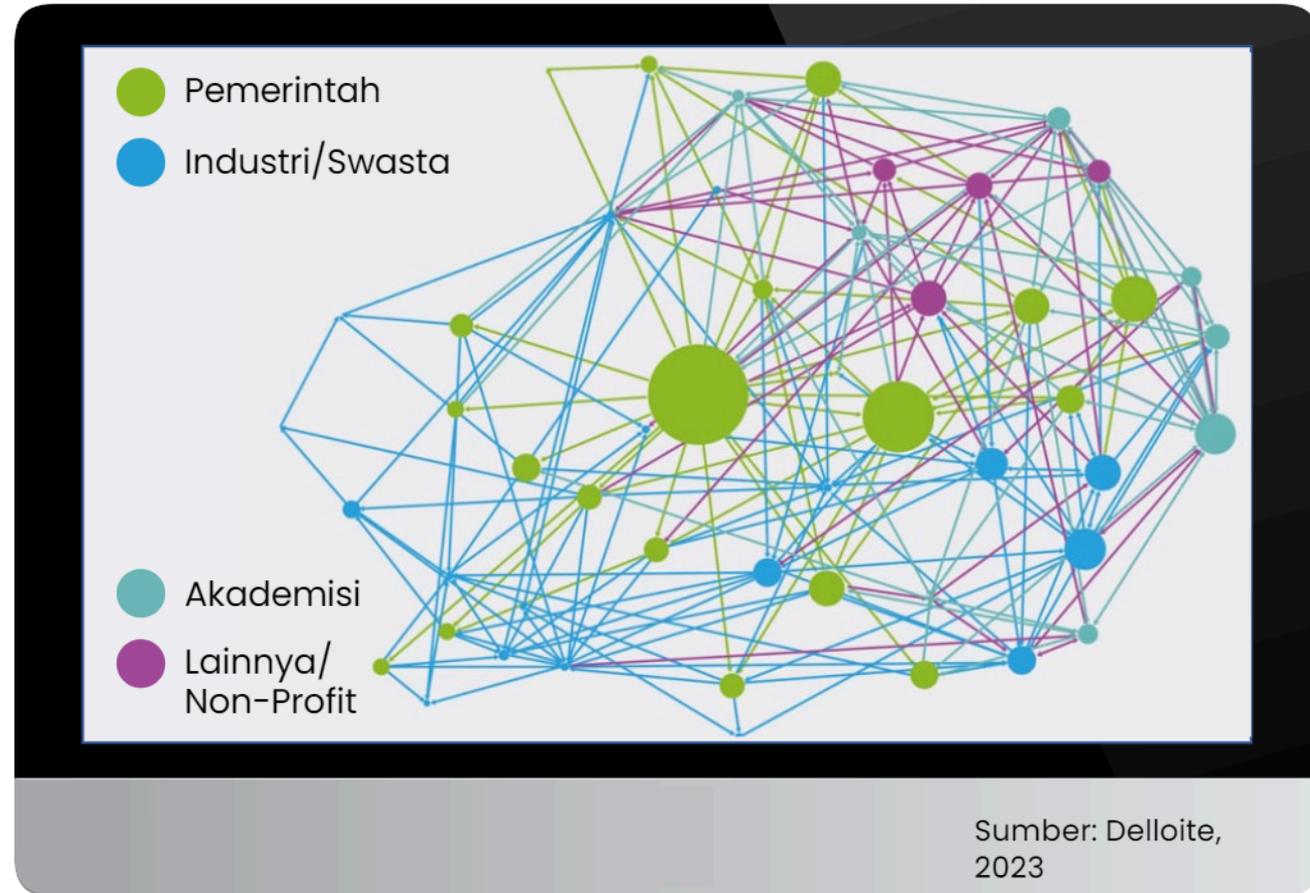
## KOMUNITAS (MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA)

Menyampaikan gagasan, ide, dan inovasi serta menjembatani pemerintah dan masyarakat

Peta jaringan *innovation tools* menyoroti saling ketergantungan antaraktor dan *stakeholder*

**TIDAK ADA SATU AKTOR PUN YANG DAPAT MENCAPAI TUJUAN TANPA MEMPENGARUHI AKTOR LAIN (KOLABORASI)**

## **SAATNYA KOLABORASI, BUKAN SEKADAR KOMPETISI**





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# TERIMA KASIH